



## WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, DIAWASI Potensial Dongkrak PAD, Sistem E-Tax Harus Optimal

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya diminta lebih serius menggarap sistem e-tax atau perpajakan secara elektronik. Hal ini karena memiliki potensi yang tinggi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sistem itu pun harus digulirkan secara menyeluruh ke wajib pajak.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, menjelaskan pihaknya sudah memberikan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja dengan tim eksekutif. "Kami menyoroti sistem e-tax. Sejauh mana alat berupa *tapping box* itu telah terpasang di tempat-tempat potensial penghasilan pajak di Kota Yogya," jelasnya, Jumat (10/1).

Sesuai dengan komitmen awal, terdapat 1.700 wajib pajak yang ditarget pemasangan *tapping box*. Seluruhnya merupakan wajib pajak sektor hotel, restoran, parkir dan hiburan. Akan tetapi hingga akhir tahun 2019 lalu baru terpasang 43 alat yang menggunakan APBD Kota Yogya. Hingga tiga tahun ke depan, Pemkot bekerja sama dengan BPD DIY untuk memasang 400 unit *tapping box*.

Rifki mengaku, salah satu fungsi pantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B ialah potensi PAD dari pajak hotel dan restoran. Kedua jenis pajak dae-

rah tersebut menyumbang PAD hingga 30 persen dari total 10 jenis pajak daerah. "Sistem e-tax diyakini akan mendongkrak PAD. Wajib pajak yang sudah terpasang *tapping box* otomatis setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak akan terekam," imbuhnya.

Sebelum menerapkan e-tax, proses pelaporan pajak hotel dan restoran dilakukan secara manual. Wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang diselarasakan dengan transaksi dari konsumen. Pemkot hanya memonitor laporan tersebut. Jika ditemukan perbedaan yang besar dari estimasi Pemkot, baru dilakukan pemeriksaan.

Berbeda dengan pemantauan berbasis hasil rekaman *tapping box*. Hal ini karena semua transaksi akan tercatat, dan jika terjadi permasalahan atau ketidaksesuaian maka akan muncul kode sinyal. Wajib pajak pun bisa langsung melakukan revisi dan potensi kebocoran pajak bisa ditekan sedini mungkin.

"Makanya kami meminta agar wajib pajak yang ditarget pemasangan *tapping box* segera dituntaskan. Empat puluh tiga wajib pajak yang sudah terpasang ini kan selama ini memang sudah patuh dalam membayarkan pajak. Jadi belum bisa kita bandingkan," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005